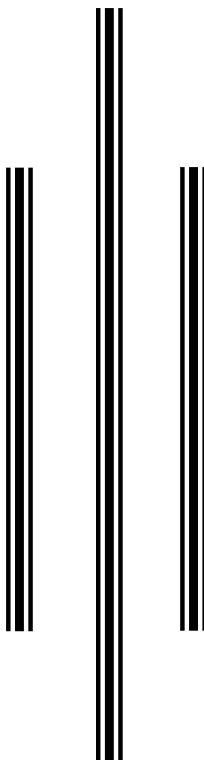




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024 - 2026



“Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan”

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT serta atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 telah selesai disusun.

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan salah satu bentuk upaya implementasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026, serta pokok-pokok pikiran misi pembangunan Sumatera Selatan dalam meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya.

Sebagai dokumen perencanaan strategis, penyusunan ini juga mempertajam berbagai program dan kegiatan strategis serta untuk mewujudkan komitmen Badan Kesatuan dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Demikian Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam upaya mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditentukan.

Palembang, Januari 2023
Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. SUNARTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I IV.b
NIP. 196906081990031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL..... iv

DAFTAR BAGAN v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN 6

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD 6

2.2 Sumber Daya OPD 17

2.3 Kinerja Pelayanan OPD 19

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan OPD 39

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 41

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah 41

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 45

3.3 Telaahan Renstra K/L dengan Renstra Kabupaten/Kota 46

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 48

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 49

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... 51

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 51

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD 52

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 53

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 55

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 62

BAB VIII PENUTUP 71

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang 19

Tabel 2.2 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin 19

Tabel 2.3 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....19

Tabel 2.4 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Agama 20

Tabel 2.5 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan 20

Tabel 2.6 Potensi Konflik di Sumatera Selatan 24

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 25

Tabel 2.8 Jumlah Orang Asing/Pendatang di Provinsi Sumsel 27

Tabel 2.9 Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan 29

Tabel 2.10 Jumlah LSM/ORKESMAS danYayasan yang Terdaftar 31

Tabel 2.11 IDI Provinsi Sumatera Selatan.....34

Tabel 2.12 Pendidikan Politik di Provinsi Sumatera Selatan.....36

Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat.....38

Tabel 3.01 Pemetaan Permasalahan 41

Tabel 4.01 Tujuan, Sasaran, Jangka Menengah 48

Tabel 5.01 Strategi dan Arah Kebijakan.....53

Tabel 6.01 Indikator Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan 56

Tabel 7.01 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacuh pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....62

Tabel 7.02 Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang Mengacuh pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 63

Tabel 7.03 Indikator Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan yang mengacuh pada Tujuan dan Sasaran.....64

DAFTAR BAGAN

Tabel 2.1 Bagan Struktur Organisasi 21

Tabel 2.2 Bagan Perbandingan IDI Sumsel dengan IDI Nasional 32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat, serta dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru.

Sebagai konsekwensi desentralisasi dari kebijakan pemberian otonomi, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan

daerah merupakan sub-sistem dari perencanaan pembangunan nasional.

Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan memuat tujuan, sasaran strategis, dan arah kebijakan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Proses penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dilakukan melalui tahapan yaitu :

- a. Persiapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Penyusunan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan;
- d. Penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 dilaksanakan oleh tim penyusun yang beranggotakan beberapa pejabat struktural dan staf di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 menyelaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan.

Di samping itu, agar penyelenggaraan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Sumatera Selatan dapat bersinergi dengan penyelenggaraan pembangunan nasional, penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selain mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026, juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Renstra Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum lingkup Kementerian Dalam Negeri 2020-2024.

1.2. LANDASAN HUKUM :

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru.

9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 1 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam menentukan prioritas program tahun 2024 baik pelaksanaan pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik Pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 :

1. Mempertajam perencanaan yang sudah dilakukan pada rencana pembangunan sesuai yang diharapkan.
2. Menyediakan tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.
3. Memudahkan jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dan stakeholder terkait dalam mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri secara terpadu dan terarah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan dan penulisan Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Bab II : Gambaran Pelayanan OPD

Pada bab ini berisi tugas dan fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan serta aset yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis OPD

Pada bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, dan Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota serta penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang disajikan dalam tabel.

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam bab ini dibahas tentang rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dalam di tahun mendatang.

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan

Dalam bab ini dibahas tentang program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam bab ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel.

Bab VII : Penutup

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan harapan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Pada Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur pemerintahan umum yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- I. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, yang membawahi :
 1. Subbagian Program dan Anggaran;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi:
 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
 1. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
 2. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:

1. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama; dan
 2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi:
1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 2. Subbidang Penanganan Konflik.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

II. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Tugas Pokok

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideology pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideology pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penangan konflik sosial di wilayah provinsi;

- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

b. Sekretariat

1. Tugas Pokok

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

2. Fungsi

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan asset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi;
- e. Pengelolaan urusan aparatur sipil Negara lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja
- b. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, serta verifikasi dan pembukuan.
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian.

c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

2. Fungsi

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran

- kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari :

- a. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
- b. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

d. Bidang Politik Dalam Negeri

1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

2. Fungsi

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala

- daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- b. Perumusan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
 - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
 - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :

- a. Subbidang pendidikan politik dan peningkatan demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.

- b. Subbidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang asilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik.

e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

1. Tugas Pokok

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Oragnisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

2. Fungsi

- a. Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan

- narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
 - e. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, social, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi

sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

1. Tugas Pokok

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.

2. Fungsi

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;

- e. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari :

- a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.
- b. Subbidang Penanganan Konflik bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Tugas Pokok

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan memiliki 3 orang pejabat fungsional terdiri dari 2 arsiparis dan 1 orang pranata komputer seperti terlampir pada tabel 2.5 Struktur Organisasi.

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN
 BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI SUMATERA SELATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
 H. HERMAN DERU

2.2 Sumber Daya OPD

2.2.1. Susunan Kepegawaian

- a. Susunan Kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan ruang

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2022 berdasarkan pangkat dan golongan ruang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Susunan Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai	Pangkat / Golongan				Jml (Orang)
	Juru/I (Orang)	Pengatur/ II (Orang)	Penata /III (Orang)	Pembina /IV (Orang)	
Total	0	4	23	14	41

- b. Susunan Kepegawaian berdasarkan jenis kelamin

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Susunan Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-Laki	26
3	Perempuan	15
Jumlah		41

- c. Susunan Kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan, dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Susunan Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SD	1
2	SLTP	0
3	SLTA	9
4	DIII	1
5	DIV/S1	8
6	S2	22
Jumlah		41

- d. Susunan Kepegawaian berdasarkan agama
- Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2022 berdasarkan agama, dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Susunan Kepegawaian berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (Orang)
1	Islam	41
2	Kristen	0
Jumlah		41

- e. Susunan Kepegawaian berdasarkan agama
- Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2022 berdasarkan jabatan, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Susunan Kepegawaian berdasarkan Jabatan

No	Jabatan/Struktural/Fungsional	Jumlah (Orang)
1	Esselon II	1
2	Esselon III	5
3	Esselon IV	11
4	Fungsional	3
Jumlah		20

- f. Aset yang dikelola
- Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai aset/modal yang terdiri dari :
1. Tanah seluas 1.380 m2
 2. GedungdanBangunan990 m2
 3. Alat kantor dan rumah tangga terdiri dari
 - a. Komputer : 11 Unit
 - b. Printer : 13 Unit
 - c. Mesin Ketik : 4 Unit
 - d. Laptop : 7 Unit
 - e. Infocus : 2 Unit
 4. Alat Transportasi :
 - a. Kendaraan Roda Empat : 16 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan adalah OPD yang membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dari hasil identifikasi dilihat dari Bidang dan Bagian masing-masing kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

a. Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Sebagai Negara bangsa yang plural Indonesia tengah berada di pusaran arus Globalisasi yang akan mempengaruhi pola pikir anak bangsa dalam memandang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam era globalisasi di dalamnya melekat proses transformasi sistem nilai yang tidak akan pernah dapat dibendung dan akan terus berlanjut sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Jakob, 1988). Masalahnya sebagai bangsa saat ini Indonesia tengah mengalami krisis kebangsaan yang cukup serius bahkan kronis yang ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok eksklusifisme berdasarkan pada sentiment primordial sehingga pada gilirannya berbagai konflik yang bersifat horizontal sering dan cenderung mudah terjadi di seluruh Indonesia. Ditengarai salah satu faktor yang menjadi penyebab timbulnya krisis kebangsaan adalah nilai-nilai yang ada pada Pancasila sudah tidak digunakan lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat, Pancasila sekedar formalitas tanpa makna, Pancasila belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara (berdasarkan hasil survey nilai-nilai kebangsaan oleh BPS 2015 : 24 dari setiap 100 orang tak hafal sila-sila Pancasila). Dalam konteks ini Pancasila sebagai perekat kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat seharusnya perlu terus ditingkatkan pemahaman dan implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat serta pembentukan jati diri sebuah bangsa. Pancasila beserta nilai-nilainya sebagai pandangan ideologi dan hidup bangsa harus terus diamalkan dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat, sehingga

kita dapat membuat konsep kebangsaan yang tepat untuk masa depan.

Menurunnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta pemahaman masyarakat dalam pembauran kebangsaan (berdasarkan hasil survey nilai-nilai kebangsaan oleh BPS 2015 : Dari setiap 100 orang Indonesia, 18 orang bahkan tak tahu judul lagu kebangsaan Republik Indonesia; 53% orang Indonesia tak hafal seluruh lirik lagu kebangsaan; 42% orang terbiasa menggunakan barang bajakan; 55% orang Indonesia jarang bahkan tidak pernah ikut kerja bakti).

Rasa kebangsaan pada hakekatnya merupakan persatuan dan kesatuan secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh melalui sejarah dan aspirasi perjuangan masa lalu serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Oleh karenanya dalam wawasan kebangsaan terkandung adanya tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati dirinya sebagai penjelmaan kepribadiannya (Sumandjoko, 1995). Wawasan kebangsaan mengandung pengertian ; cara dalam melihat keberadaan dirinya yang dikaitkan nilai-nilai dan semangat kebangsaan dalam suatu Negara. Dalam dirinya terkandung suatu makna sebagai kemampuan diri untuk merasa bahwa dirinya adalah bagian integral dari bangsa dan Negara di mana dirinya berada. Semakin mereka mengerti dan mendalami nilai-nilai dan semangat yang telah disepakati bersama dalam suatu Negara serta menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat, maka akan semakin kokoh pula keberadaan bangsa dan negaranya.

b. Kewaspadaan Dini

Secara umum situasi daerah-daerah di Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu 2019-2023 aman dan tertib. Meskipun kondusif bagi pembangunan masih terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain aksi terorisme, kerusakan, konflik sosial, unjuk rasa, serta masih adanya paham keagamaan radikal dan aliran sesat di masyarakat,

Dalam rangka menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat terhadap potensi konflik yang mungkin terjadi, maka

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyuluhan atau sosialisasi mengenai Narkoba dan pencegahan perselisihan antar kelompok masyarakat. Untuk deteksi dini konflik selalu dilaksanakan rapat koordinasi melalui forum komunitas intelijen daerah yang hasil rekomendasi dari forum komunitas intelijen daerah menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan untuk mengantisipasi konflik yang mungkin terjadi.

Data potensi konflik yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Potensi Konflik di Provinsi Sumsel
Tahun 2022

No	Potensi Konflik	Jumlah
1	Terkait IPOLEKSOSBUD	36
2	Terkait SARA	0
3	Terkait Batas Wilayah	16
4	Terkait Sumber Daya Alam	26

Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

Pencapaian kinerja, baik dari sisi pelayanan dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7. (T.C. 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Selatan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Satuan	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Persentase Kabupaten/Kota tanpa konflik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumsel	%	79	80	81	82	83	77,14	78,96	78,63	0	0	97,64	98,70	97,1	-	-

Untuk mengetahui secara dini keberadaan tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pemantauan tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 50 tahun 2010 tentang pedoman pemantauan tenaga kerja asing di daerah, di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Pengawasan orang asing dan organisasi masyarakat asing di Sumatera Selatan kian mendapat tempatnya pasca kebijakan pemerintah yang memberikan ruang gerak bagi orang asing 'berkarir' di Indonesia. Pemerintah tentu memiliki maksud yang baik melalui sebuah analisa strategis dalam kebijakan itu, namun seiring dengan itu hadir pula tantangan dalam pengawasan yang ketat dilakukan, sebab lalu-lintas orang asing yang masuk ke Indonesia tidak selamanya membawa kebaikan bagi Sumatera Selatan. Selain ketidak lengkapan dokumen imigrasi, dalam banyak kasus seringkali orang asing datang dengan misi berbeda. Pada titik ini peran Badan Kesatuan Bangsa dan politik menjadi sangat penting.

Memang, lalu lintas manusia menjadi keniscayaan dalam era yang semakin terbuka saat ini. Terbukanya kanal kerjasama antar negara seperti adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015, Bebas Visa, AFTA tahun 2020, dan kerjasama internasional lainnya memungkinkan terbukanya kesempatan transfer barang, jasa dan manusia yang semakin masif. Keterbukaan tersebut tidak hanya memberikan keuntungan bagi Sumatera Selatan seperti peningkatan devisa, namun juga turut menghadirkan beragam ancaman.

Beberapa ancaman yang dapat diidentifikasi antara lain masuknya ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila, adanya kejahatan transaksional, dan tenaga kerja ilegal, ialah sedikit dari sekian ancaman yang harus diantisipasi. Bahkan orang asing yang telah memiliki dokumen keimigrasian pun wajib di antisipasi dengan prinsip skeptisme atau kehati-hatian yang dilakukan secara terkoordinir, sistematis dan partisipatif. Sebab, setiap orang asing juga berpotensi memiliki peran ganda ketika beraktivitas di wilayah Sumatera Selatan. Hal tersebut dapat memberikan ancaman dari sisi keamanan wilayah, ketertiban sosial maupun ketenagakerjaan.

Orang asing pada tahun 2018 tercatat 700 orang lebih, Tenaga kerja asing yang masuk di Sumatera Selatan sebagian besar berasal dari China, Malaysia, Singapura, dan Thailand yang tersebar di beberapa sektor yaitu perindustrian dan perdagangan sebanyak 214 orang, pertanian 50 orang, kehutanan 6 orang, pertambangan dan sumber daya mineral 315 orang, agama 2 orang, Sosial kemasyarakatan 3 orang, sektor pendidikan 13 orang, sektor konstruksi 50 orang dan perhotelan 16 orang. Lebih rinci hasil pemetaan yang dilakukan di wilayah kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan asal negara dapat dilihat pada table dibawah 2.8.

Tabel 2.8
Jumlah Orang Asing Pendatang
di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Tahun	Asal	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5
1	2019	Singapura, Thailand, Malaysia, Jepang, India, Inggris, USA, Korsel, Taiwan, RRC, Australia, Filipina, Jerman, Rusia, Perancis, Saudi Arabia	774 Orang	
2	2020	Singapura, Thailand, Malaysia, Jepang, India, Inggris, USA, Korsel, Taiwan, RRC, Irlandia, Australia, Filipina, Jerman, Perancis, Saudi Arabia, Belgia	721 Orang	
3	2021	Singapura, Thailand, Malaysia, Jepang, India, Inggris, USA, Korsel, Taiwan, RRC, Irlandia, Australia, Filipina, Jerman, Rusia, Saudi Arabia, Belgia	1.536 Orang	
4	2022	Amerika, Australia, India, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Kanada, Malaysia, Filipina, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, RRC, Irlandia, Uruguay, Finlandia, Spanyol, Swedia, Rusia, Belarusia, Chile, Norwegia, Polandia, Argentina, Myanmar, Italia, Vietnam, Mesir, Brazil, Republik Korea, Denmark, Pakistan, South Africa, Kroasia, Perancis, Maroko, Libanon.	1.553 Orang	
5	2023	-	- Orang	

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

Di Indonesia, demonstrasi merupakan hal yang diperbolehkan asalkan tidak berbuat anarkis. Demonstrasi bahkan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Unjuk rasa atau demonstrasi atau lebih dikenal dengan demo adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atau menentang kebijakan

yang dilaksanakan suatu pihak atau sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok tertentu. Unjuk rasa atau demonstrasi dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah mufakat, kepastian hukum dan keadilan, proporsional, serta asas manfaat.

Sehubungan dengan meningkatnya demonstrasi yang dilakukan oleh ormas tertentu akhir-akhir ini, peran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam mencegah aksi demonstrasi, adalah Meningkatkan fasilitasi politik yang sehat di masyarakat, demonstrasi yang dilakukan ormas tertentu ini dikarenakan komunikasi antar pemerintah dan ormas tersebut belum terbangun dengan baik, dalam artian komunikasi mereka tersumbat sehingga jalan keluar yang dilakukan adalah demonstrasi.

Ketika demonstrasi menjunjung tinggi demokrasi, maka dipandang sebagai hal positif dan mempunyai nilai baik di mata masyarakat, namun ketika demonstrasi mengabaikan demokrasi maka dipandang masyarakat sebagai hal yang tercela atau negatif. Oleh karena itu apa yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam memantau perkembangan kebebasan berpendapat (demontrasi) sangat diperlukan untuk kewaspadaan dini agar tidak mengarah ke konflik sosial.

Tabel 2.9
Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan

No.	Tuntutan	Tahun					Ket
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Ideologi	-	-	-	2	-	
2.	Politik	-	-	2	12	-	
3.	Ekonomi	-	-	5	5	-	
4.	Sosbud	-	-	10	18	-	
Jumlah		-	-	17	37	-	

Ketahanan Ekonomi dan Sosial bertujuan untuk meminimalisir indeks potensi konflik yang diakibatkan oleh dimensi ekonomi melalui penguatan ketahanan ekonomi dan social masyarakat. Kerja sama antar pemerintah, stakeholder dan masyarakat merupakan hal

yang harus dilakukan. Sudah saatnya pelibatan public dilakukan dalam rangka penyelesaian masalah yang ada di masyarakat.

Data yang dirilis oleh BPS tahun 2020 mengenai indeks rasio gini Sumatera Selatan yaitu sebesar 0,355 tidak bisa dijadikan dasar bagaimana sebenarnya ketahanan ekonomi masyarakat Sumatera Selatan saat ini sehingga perlu membuat ukuran-ukuran sendiri mengenai kondisi ketahanan ekonomi dan social masyarakat, karena setiap daerah memiliki karakteristik sendiri dalam kondisi social ekonominya.

Ketahanan Ekonomi dan Sosial lebih memfokuskan pada isu-isu penting yang harus segera di tangani yaitu bagaimana pengelolaan potensi-potensi ekonomi yang ada sehingga kesempatan/peluang ekonomi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Instansi pemerintah berperan penting untuk mengakomodir kebutuhan apa saja yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka pemanfaatan potensi ekonomi yang ada. Lembaga/stakeholder yang lain juga melakukan upaya-upaya penguatan dan pemanfaatan potensi ini melalui kegiatan yang ada pada lembaga tersebut.

Penanganan Dampak Sosial, yaitu penanganan/penyelesaian dampak-dampak sosial yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi. Misalnya, penambangan Pasir di sungai musi menimbulkan berbagai dampak sosial yang ada sehingga perlu penanganan mengenai hal tersebut. Tidak bisa dinafikan bahwa setiap aktivitas ekonomi masyarakat akan ada dampak baik social maupun lingkungan tetapi bagaimana usaha untuk bias meminimalisir dampak sosial/lingkungan yang ditimbulkan.

Edukasi kepada masyarakat agar membeli barang di pasar tradisional agar bias menguatkan pelaku ekonomi tradisional. Penanganan dampak sosial yang ada dimasyarakat tidak bias diselesaikan sendiri oleh Pemerintah sehingga peran public menjadi salah satu solusi. Misalnya Akademisi, Forum-Forum di Masyarakat, LSM, Media massa dll yang diharapkan mampu menggaungkan isu penting yang ingin di selesaikan.

Dari aspek penguatan integrasi nasional, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan program dan kegiatan yang terkait aspek penguatan integrasi nasional yang mencakup pembinaan ketahanan ekonomi dan

pembinaan dan penguatan peran LSM/Orkemas setiap tahun dilaksanakan yang dilihat dari semakin bertambahnya jumlah LSM/Orkemas yang terbentuk di Provinsi Sumsel.

Adapun bentuk pembinaan terhadap LSM/Orkemas yang telah dilaksanakan dalam berbagai kegiatan sebagai berikut :

1. Pendidikan budaya politik bagi elemen masyarakat dan partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman fungsionaris parpol, tokoh masyarakat, agama, pemuda, wanita dalam berpolitik dan berorganisasi di masyarakat;
2. Fasilitasi perkembangan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota. Indikator kinerja kegiatan ini adalah tersedianya SKT Orkemas dan terpantaunya eksistensi keberadaan sekretariat Orkemas;
3. Pembinaan Ormas dan LSM di Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan keanggotaan LSM dan Ormas;
4. Penyusunan Grand Desain Penataan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Selatan;
5. Sosialisasi Peraturan tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan pemahaman mengenai peraturan tentang Orkemas.

Tabel 2.10
Jumlah LSM/ORKESMAS, Yayasan yang Terdaftar
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2019-2023

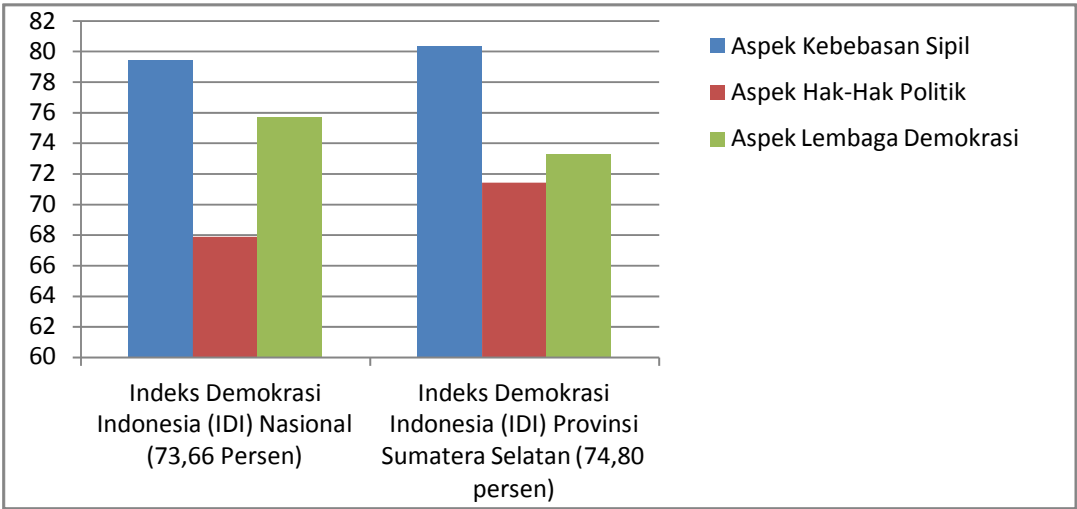
No.	Tahun	Orkemas	LSM	LNL	Jumlah
1.	2019	9	7	-	16
2.	2020	4	-	-	4
3.	2021	10	6	-	16
4.	2022	4	-	-	4
5.	2023	-	-	-	-

Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di tahun 2020, angka capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di

Provinsi Sumatera Selatan adalah 74,80 persen, angka tersebut diatas capaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional yaitu sebesar 73,66 persen. Perbandingan angka capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Sumatera Selatan dengan capaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional disajikan dalam gambar bagan sebagai berikut:

Bagan 2.2

Perbandingan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Selatan dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nasional



Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Sumatera Selatan yang dilihat dari ketiga aspek tersebut, yaitu:

- a. **Aspek Kebebasan Sipil 2021**, merupakan yang terendah di provinsi Sumatera Selatan sepanjang pengukuran IDI dilakukan dengan angka 85,08 persen. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal (yang merupakan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, yaitu pembinaan empat konsensus dasar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI), fasilitasi forum pertemuan, rapat koordinasi terkait dengan isu ekonomi dan sosial dalam rangka memperkuat ketahanan nasional belum optimal, dan faktor eksternal (yang merupakan di luar kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan), yaitu peningkatan peran ormas, dan lembaga kemasyarakatan juga dapat berperan aktif dalam meningkatkan aspek kebebasan sipil. Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Sumatera Selatan yaitu kegiatan-kegiatan dalam mendukung tingkat capaian aspek kebebasan sipil belum dilaksanakan secara optimal dari segi frekuensi kegiatan, bobot materi, dan pendanaan;

- b. **Aspek Hak-Hak Politik 2021**, di Provinsi Sumatera Selatan adalah 78,51 persen. fluktuasi indeks di aspek ini dipengaruhi oleh variabel partisipasi politik dalam pengawasan, salah satu indikatornya adalah demonstrasi dengan kekerasan, pengaruh faktor internal (yang merupakan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan), yaitu pencegahan dini potensi kerawanan konflik politik, ekonomi, sosial dan sara belum dilakukan secara optimal pada daerah rawan konflik, dan pengaruh faktor eksternal (yang merupakan di luar kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan), yaitu optimalisasi peran mitra kerja kesbangpol, yaitu institusi TNI dan Polri dalam pencegahan konflik pada daerah rawan konflik. Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yaitu kegiatan-kegiatan dalam mendukung tingkat capaian aspek hak-hak politik belum dilaksanakan secara optimal dari segi frekuensi kegiatan, bobot materi, dan pendanaan;
- c. **Aspek Lembaga Demokrasi** di Provinsi Sumatera Selatan adalah 72,41 persen, angka capaian ini diantaranya dipengaruhi oleh peran birokrasi pemerintah yang seharusnya bersifat netral terhadap semua kontestan dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada. Pengaruh faktor internal (yang merupakan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan), yaitu pendidikan budaya politik dan peran partai politik yang belum optimal terutama kepada aparatur sipil pemerintah dan kader partai politik, dan pengaruh faktor eksternal (yang merupakan di luar kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan), yaitu optimalisasi peran KPU dan Badan Pengawas Pemilu dalam menjaga netralitas penyelenggaraan pemilu/pemilukada. Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yaitu kegiatan-kegiatan dalam mendukung tingkat capaian aspek lembaga demokrasi belum dilaksanakan

secara optimal dari segi frekuensi kegiatan, bobot materi, dan pendanaan, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.11
Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Sumsel
Tahun 2017-2021

No.	Aspek/Variabel	Tahun (Skor)				
		2017	2018	2019	2020	2021
I	Kebebasan Sipil	90,83	83,13	80,54	80,32	85,08
	1.Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	96,88	56,25	100,00	100,00	100,00
	2.Kebebasan Berpendapat	100	83,30	34,05	3,47	3,47
	3.Kebebasan Berkeyakinan	93,84	88,08	90,77	90,77	90,77
	4.Kebebasan Dari Diskriminasi	77,79	80,40	66,79	77,79	77,79
II	Hak-hak Politik	63,90	73,12	81,95	71,39	78,51
	1.Hak Memilih dan Dipilih	78,08	78,85	83,46	83,55	83,55
	2.Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	49,72	67,39	80,43	59,24	59,24
III	Lembaga Demokrasi	69,03	76,01	72,23	73,25	72,41
	1.Pemilu Yang Bebas dan Adil	97,73	97,73	84,70	84,70	84,70
	2.Peran DPR	55,42	44,40	34,21	37,52	37,52
	3.Peran Partai Politik	99,14	99,88	99,56	100,00	100,00
	4.Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	4,52	44,21	45,41	46,62	46,62
	5.Peran Peradilan Yang Independen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah		80,95	74,04	77,14	78,96	78,63

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Dalam pengembangan pendidikan politik masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir telah melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan yang mendorong peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan menyadari betapa pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat karena pendidikan politik adalah suatu sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik merupakan salah satu alternatif proses demokratisasi dinegara kita untuk menyadarkan bahwa demokrasi merupakan salah satu alat atau sarana efektif dan efisien bagi perwujudan kesejahteraan disetiap aspek kehidupan masyarakat. Pendidikan politik yang dilaksanakan melalui sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan politik kepada masyarakat maupun kepada partai politik, penyebaran informasi politik serta melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada di Sumatera Selatan.

Kondisi politik di Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan melalui pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden, serta pemilukada yang berjalan demokratis dan tertib tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Partisipasi pemilih dalam perhelatan pemilu memiliki kecenderungan yang semakin membaik di tingkat nasional, yang terus naik.

Tingkat persentase pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 sebesar 69,2% naik menjadi 67% pada Tahun 2013. Selanjutnya untuk tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Kab/Kota selama kurun waktu Tahun 2013-2018, dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi Kota Pagaralam 84,5% pada pilkada serentak tahun 2018 dan terendah Kabupaten Musi Banyuasin 59,37% pada pilkada tahun 2017. Adapun partisipasi pada pemilu DPR/DPRD dan Pilpres tahun 2009 mencapai sebesar 76,70% dan 77% pada tahun 2014, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2013 sebesar 67%. Sedangkan pada Pilkada serentak 2018 Kabupaten/Kota, yaitu : Kota Palembang 70,03%, Kabupaten Lahat 73,53,%, Kabupaten Muara Enim 72,78%, Kota Prabumulih 74,27%, Kota Pagaralam 84,5%, Kota Lubuk Linggau 71,16%, Kabupaten Banyuasin 82,35%, dan Kabupaten Empat Lawang 69,38%. Upaya peningkatan partisipasi pemilih dilakukan melalui pendidikan politik sebagaimana tabel di bawah ini :

Data Pendidikan Politik yang telah dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan selama 5 tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.12
Pendidikan Politik Masyarakat di Provinsi Sumsel
Tahun 2014-2018

No .	Kegiatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendidikan Politik Bagi Elemen Masyarakat	1	2	1	1	1
2	Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Parpol	5	3	1	1	1
3	Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat	2	4	2	1	2
Jumlah		8	9	4	3	4

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh Pemerintah. Namun untuk

mengukur pencapaiannya baik ditingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat dalam memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Sumatera Selatan.

Rendahnya angka keterpilihan perempuan di lembaga Legislatif di Indonesia masih menjadi kajian menarik oleh beberapa kelompok sampaisekarang, sebut saja diantaranya yaitu kelompok pegiat gender. Salah satulembaga legislatif di Indonesia yang memiliki masalah dengan angka rendahnyaketerpilihan perempuan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sejak hadirnya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam pasal 65 UU nomor 12 tahun 2003 yaitu tentang penetapan kuota 30% keterwakilan politik perempuan di legislatif sebagai *affirmativeaction* dalam pemilu 2004 sampai sekarang, faktanya kebijakan tersebut masih belum mampu meningkatkan jumlah keterpilihan perempuan di lembaga legislatif. Selama 3 periode pemilu, jumlah laki-laki masih diatas jumlah perempuan. Bahkan angka kritis 30% untuk perempuan di lembaga legislatif pun tidak tercapai. Sejauh ini, angka maksimal keterpilihan perempuan yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan baru berjumlah 15 orang atau sekitar 20 persen dari total keseluruhan sebanyak 75 orang. Tentunya, *affirmative action* perlu mengalami perbaikan lagi, sampai akhirnya kebijakan itu dapat menjadi solusi terhadap krisis perempuan dalam politik. Dari berbagai faktor penyebab tidak tercapainya tujuan peningkatan perempuan di lembaga legislatif, sepertinya butuh pembedahan kasus yang lebih mendalam lagi. Gunanya agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien. Sedangkan manfaat akhirnya adalah dapat menjadi masukan untuk pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan *affirmative action* yang sukses meningkatkan angka perempuan di lembaga legislatif di Indonesia pada umumnya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan khususnya. Hasil penelitian dengan konsep *affirmative action* menunjukkan bahwa kendala masih rendahnya keterwakilan politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebabkan oleh faktor keuangan

yang dimiliki calon, *stereotype*, gender, budaya patriarki dan lemahnya kemampuan caleg perempuan dalam politik serta modal komunikasi yang belum baik. Ada tiga hal untuk membuat kesuksesan terhadap kebijakan *affirmative action* yaitu pertama perbaikan dari aspek peraturan, kedua, perbaikan dari aspek perempuan calon dan ketiga adalah perbaikan dari pola pemikiran masyarakat, *SriZul Chairiyah, Universitas Andalas, Sumatera Barat*".

Untuk pelaksanaan Kinerja Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan lima tahun terakhir, pada umumnya seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi untuk mencapai hasil yang ideal memang diperlukan SDM yang sesuai dengan bidang dan tugasnya agar mudah berkomunikasi dalam pelaksanaannya, untuk itu telah dilakukan langkah-langkah yang berkesinambungan melalui rapat koordinasi.

Kendala lainnya adalah masih belum seimbang antara rasio anggaran dengan beban tugas yang harus dilaksanakan, oleh sebab itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan mengupayakan semaksimal mungkin agar rasio anggaran sesuai dengan beban tugas yang harus dilaksanakan.

Selanjutnya diharapkan pelaksanaan kegiatan kiranya dilaksanakan lebih awal dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya melalui koordinasi yang baik antara Dinas/Instansi yang berwenang. Hal ini untuk menghindari adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk lebih jelas rasio antara serapan anggaran dan pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel 2.13. dibawah ini.

Tabel 2.13. (T.C. 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1 (Rp)	2 (Rp)	3 (Rp)	4 (Rp)	5 (Rp)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri																	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan	13.990.000.000	14.850.000.000	3.588.819.230,83	2.104.894.231	2.450.000.000	11.286.721.000	11.293.651.550,50	26.793.899.600	36.072.722.200	75.404.763.093	80,67	76,05	46,59	17,13	95,10	15,54%	1,92%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan OPD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan terdapat berbagai tantangan antara lain sebagai berikut :

1. Masih adanya konflik dimasyarakat yang berhubungan dengan Wilayah Perbatasan Daerah, Kepemilikan Lahan, dan Konflik yang berhubungan dengan SARA;
2. Belum efektifnya kelembagaan politik dalam memainkan peran dan fungsinya dalam sistem politik nasional;
3. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik dalam rangka membangun etika dan moral politik;
4. Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dan kesadaran berperilaku berwawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta penyalagunaan narkoba;
5. Belum mantapnya ketahanan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah;
6. Masih signifikannya kesenjangan antar daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial;
7. Masih lemahnya ketahanan budaya dan kerukunan umat beragama dalam menghadapi globalisasi.

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya terefleksinya keterbukaan komunikasi politik antar infrastruktur politik dan suprastruktur politik;
2. Makin berperannya lembaga legislative dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat;
3. Berkembangnya organisasi kemasyarakatan sebagai asset pembangunan nasional;
4. Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai aset budaya nasional;
5. Meningkatnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan;
6. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan terhadap potensi bahaya ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila;

7. Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah;
8. Terkoordinasinya penanganan terhadap konflik sosial, konflik etnis dan gerakan ketidakpuasan masyarakat;
9. Berperannya pemuka agama, adat, tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu berbagai permasalahan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian hidup masyarakat;
10. Meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat terhadap gejolak konflik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa merupakan pondasi bagi kelangsungan pemerintah dan pembangunan daerah, secara objektif karakteristik daerah di mana pemerintahan dibangun atas kemajemukan mempunyai kerawanan sosial, politik dan kewilayahan yang mengarah kepada konflik sosial yang berdimensi vertikal dan horizontal yang melatar belakangi permasalahan ras, suku, budaya dan agama yang pada akhirnya dapat mengancam integrasi nasional.

Sebagai lembaga teknis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu mengacu kepada Kebijakan teknis dan strategis pembangunan kesatuan bangsa dan politik jangka pendek dan jangka menengah. Pokok-pokok kebijakan teknis dan strategis tersebut dari tahun ke tahun selalu mengalami perbaikan dengan penajaman prioritas dan penambahan obyek dan sasaran baru yang disesuaikan dengan perkembangan. Kaitannya dengan hasil capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan perlu dievaluasi dan dimonitoring.

Sesuai dengan perkembangan dan bergulirnya era reformasi, masyarakat menuntut agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan lebih berperan aktif dalam menciptakan pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan adanya kesadaran diri dan kemauan yang kuat untuk merubah atas perilaku, pola pikir, pola kerja dari seluruh SDM yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, agar tercipta kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan yaitu menjadi institusi yang berperan sebagai fasilitator, mediator dan komunikator terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Beberapa permasalahan aktual yang seringkali terjadi antara lain adalah :

- a. Belum Optimal pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. Belum Optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi;
- c. Masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dan perkembangan politik;
- d. Kurangnya pemahaman wawasan kebangsaan dalam diri generasi muda;
- e. Maraknya penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, psikotropika dan zat adiktif lainnya di kalangan Pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum lainnya;
- f. Masih rendahnya kerukunan hidup antar umat beragama;
- g. Pendirian rumah ibadah belum sepenuhnya merujuk kepada ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 dan 09 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pembangunan rumah Ibadat;
- h. Penyampaian aspirasi oleh beberapa elemen-elemen masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, dengan pengerahan masa turun kejalan menyampaikan tuntutan mereka. Aksi damai, seringkali tanpa disadari terkontaminasi sebagai akibat diprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengarah untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu.
- i. Masih rendahnya koordinasi politik dan munculnya sikap apatis terhadap pemerintah;
- j. Munculnya paham radikalisme dan mulai lunturnya pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat;
- k. Munculnya ajaran/aliran yang dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang sudah ada, sehingga dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kondisi demikian sangat rawan dan rentan terjadinya pergesekan yang menimbulkan konflik SARA.

Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis, perlu dianalisis faktor-faktor yang menjadi kelemahan dan kekuatan baik internal maupun eksternal. Analisis lingkungan internal adalah untuk melihat kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kelemahan dan kekuatan yang akan dianalisis meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana dan pembiayaan. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

Analisis Lingkungan Internal

A. Faktor kekuatan internal (*Strength*)

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Selatan memiliki Tujuan dan Sasaran yang jelas;
2. Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan
3. Peraturan Gubernur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan;
4. Forum kemitraan dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. Faktor Kelemahan Internal (*Weakness*)

1. Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan prinsip "*theright man on the right place*" sehingga belum memadai untukpelaksanaan tupoksi;
2. Sarana dan Prasarana pendukung penyelenggara pelayanan belum memadai;

3. Dukungan dana untuk penyelenggaraan pelayanan sesuai tupoksi melalui anggaran pendapatan belanja (APBD) Provinsi Sumatera Selatan belum optimal;
4. Keberadaan Ormas belum terdata, baik secara faktual maupun aktual.

Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Analisis lingkungan eksternal mencakup pemahaman berbagai faktor-faktor di luar organisasi yang mengarah pada munculnya kesempatan bahkan ancaman bagi organisasi. Ancaman atau tantangan (*Threats*) adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha organisasi untuk mencapai daya saing strategis. Peluang (*Opportunities*) adalah kondisi lingkungan umum yang dapat membantu organisasi mencapai daya saing strategis. Analisis lingkungan eksternal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan peluang-peluang diberbagai aspek sebagai berikut :

A. Peluang (*Opportunities*)

1. Berkembangnya reformasi politik yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat;
2. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
3. Keberagaman suku dan budaya di Provinsi Sumatera Selatan;
4. Dukungan instansi terkait lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel;
5. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih mengarah kepada pelayanan masyarakat;
4. Adanya penyesuaian dengan kelembagaan pusat sehingga mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih terarah dan terfokus.

B. Ancaman (*Threats*)

1. Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang

cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi di Provinsi Sumatera Selatan;

2. Ideologi bangsa tidak mengakar kedalam hatidan kehidupan masyarakat yang diiringi dengan fenomena munculnya ideologi ideologi yang bertentangan dengan pancasila;
3. Menurunnya rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air dimasyarakat;
4. Tingginya sikap primordialisme dikalanagan masyarakat;
5. Adanya kepengurusan ganda dalam satu organisasi kemasyarakat;
6. Faktor geografis dan demografis yang menyulitkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
7. Faktor otonomi daerah yang menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur dan Esselonering antara kabupaten kota dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sehingga menghambat dalam pelaksanaan koordinasi.

3.2. Telaahan Renstra K/L dengan Renstra Provinsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tidak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sebagai SKPD Teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Demikian pula untuk kebijakan Provinsi juga berpengaruh terhadap kebijakan Kesbangpol di wilayah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan hal tersebut, maka kebijakan, tujuan dan sasaran Kesbangpol yang ada di Provinsi Sumatera Selatan diharapkan berkesinambungan dengan kebijakan Kesbangpol di tingkat Pusat dan Provinsi.

Sebagaimana Visi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri merumuskan Misi yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusatdaerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Dari Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI mengampu Misi 1 yaitu “Mantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri”. Dengan menetapkan tujuan yang di ampu Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI yaitu “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara”.

Sedangkan Visi dari Gubernur Sumatera Selatan periode tahun 2019-2023 adalah Sumsel Maju Untuk Semua. Untuk mewujudkan visi tersebut, Gubernur Sumatera Selatan merumuskan Misi yaitu:

- a. Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.
- d. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
- e. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini terkait dalam Misi ke 5 (lima) yaitu “Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius”. Dengan menetapkan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yaitu “Terwujudnya Masyarakat Madani”.

Tabel 3.2.

Telaahan Misi yang di ampu Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Republik Indonesia dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENDAGRI RI	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN
Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri	Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya

Memperhatikan Misi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI dan Bakesbangpol Provinsi Sumatera Selatan telah adanya keselarasan untuk mewujudkan Demokrasi di Sumatera Selatan dalam penyusunan Renstra 2024-2026.

Untuk telaahan Tujuan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Telaahan Tujuan yang di ampu Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENDAGRI RI	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara	Terwujudnya Berdemokrasi di Sumatera Selatan

Memperhatikan ringkasan Renstra Kementerian Dalam Negeri tersebut, khususnya pada bagian tujuan strategis, tampak adanya keselarasan Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2036 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016. Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah “Mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang Produktif, Efisien, Berkualitas dengan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Pangan dan Energi Secara Berkelanjutan Menuju Provinsi Unggul dan Terdepan”.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan meliputi:

- a. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
- b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

Dari kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan tersebut, ada kebijakan yang sesuai dengan Tujuan dan Sasaran di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu kebijakan peningkatan sosial dan budaya masyarakat, yaitu strategi :

1. Meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur;
2. Mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan ini sesuai dengan misi ke-5 juga sesuai dan relevan guna meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius serta tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026. Sebagai dampak dari kebijakan dan pengembangan rencana tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan, tersebut adalah:

- a. Potensi konflik sosial akibat dampak pengalihan dan penggunaan lahan yang akan digunakan sebagai pengembangan kawasan lindung.
- b. Potensi konflik perebutan sumber daya alam akibat dampak pengembangan kawasan kawasan lindung.

- c. Potensi konflik perbatasan atau antar wilayah atau daerah sebagai dampak pengembangan wilayah perbatasan.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan melihat berbagai permasalahan yang ditinjau dari beberapa aspek, seperti aspek politik, sosial budaya, ekonomi dan keamanan/ketentraman, dan dengan melihat dari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan serta dengan melihat peluang dan ancaman dari faktor eksternal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merealisasikan program dan kegiatan di lima tahun kedepan, maka selanjutnya ditentukan isu-isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, dapat diperoleh nilai dan kriteria isu strategis sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan DPR, DPD, maupun DPRD serta Kepala Daerah Serentak 2024 akan membawa dampak pada maraknya kegiatan politik di Provinsi Sumatera Selatan yang rentan akan terjadinya instabilitas politik di daerah.
2. Maraknya kejadian aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat yang dapat menjurus pada aksi-aksi yang anarkis.
3. Masih adanya penolakan pendirian tempat ibadat yang dapat mengarah pada isu-isu intoleransi beragama, maupun sentimen agama yang dapat mengarah pada konflik sosial serta berkembangnya radikalisme di kalangan masyarakat.
4. Masih ditemukan orang asing/Warga Negara Asing yang berkunjung maupun tinggal di Provinsi Sumatera Selatan yang dokumen keimigrasiannya tidak sesuai untuk peruntukannya.
5. Berkembangnya berita hoax (berita bohong) yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Dampak yang ditimbulkan adanya berita hoax akan sangat luar biasa antara lain, berupa dampak sosial, ekonomi, politik, keamanan dan yang lebih besar adalah bisa mengancam keutuhan negara.

6. Dalam era globalisasi sekarang ini, telah mempengaruhi rasa nasionalisme dan kebangsaan generasi muda. Seiring derasnya arus informasi dan masuknya budaya asing, telah merubah mental, sikap dan perilaku generasi muda dalam memahami wawasan kebangsaan. Generasi yang cinta akan bangsa dan negaranya lambat laun semakin terkikis dan berubah dengan generasi muda yang bergaya hidup modern dan jauh dari norma-norma budaya bangsa.
7. Berkembangnya penyalahgunaan narkoba.

Mendasari isu-isu penting yang ada tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan perlu meningkatkan kerja sama yang baik dengan berbagai unsur pemangku kepentingan baik anggota Forkompimda, TNI-POLRI, Imigrasi, BNN, Tim Kewaspadaan dini maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, guna mencapai sasaran dan target yang ada dalam program kegiatan yang telah ditetapkan, untuk mendukung misi Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang maju, sejahtera dan demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa dan etika politik menuju masyarakat berkualitas dan berbudaya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, merupakan dasar dan acuan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara terencana, terarah dan terkoordinasi. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam 2 (dua) tahun kedepan pada hakekatnya merupakan pengembangan rencana strategis secara berkelanjutan.

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 2024-2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran RPJMD/Perangkat Daerah
2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Capaian		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
I. Tujuan dan Sasaran RPJMD						
1.	Terwujudnya Masyarakat Madani	Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama (Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas)	Persentase Kabupaten/ Kota Tanpa Konflik (Zero Conflict)	100%	100%	100%
I. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah						

1.	Terwujudnya Berdemokrasi di Sumatera Selatan	Meningkatkan Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Selatan	80%	80%	80%
			2. Persentase Kabupaten/Kota Tanpa Konflik (Zero Conflict)	100%	100%	100%

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Untuk mencapai rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan agar lebih terarah perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan implementasi atau penjabaran dari rencana pembangunan daerah serta hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan. Tujuan disusun berdasarkan kriteria akseptabilitas, fleksibilitas, terukur, pendorong kinerja, dan kesesuaian dengan rencana pembangunan daerah agar mudah dipahami, guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Berdasarkan pendekatan diatas, maka tujuan jangka menengah pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah **Terwujudnya Berdemokrasi di Sumatera Selatan** sedangkan Sasaran yang ingin dicapai adalah **Meningkatkan Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama**.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sebagai indikator kinerja daerah digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026”.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Strategi dan kebijakan jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu untuk menentukan garis besar pedoman pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi penetapan kebijakan program yang diimplementasikan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam setiap tahunnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun mulai tahun 2024 sampai dengan 2026.

Strategi :

1. Peningkatan, penguatan dan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional.
2. Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI dengan melakukan pembinaan dan peningkatan wawasan kebangsaan.
3. Membangun komunikasi politik yang sehat dan berkualitas antar elemen masyarakat, partai politik dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat akan arti pentingnya pemilu dan pemilukada melalui sosialisasi dan pembinaan.

5. Melakukan pembinaan sosialisasi dan fasilitasi terhadap pengurus Ormas, LSM dan LNL di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Melakukan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

Kebijakan :

1. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi FKUB.
2. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
3. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
4. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi Komunitas Intelijen daerah (Kominda) Provinsi Sumatera Selatan.
5. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi tim terpadu penanganan konflik sosial di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Sumatera Selatan.
7. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan Kesadaran Bela Negara dikalangan masyarakat.
8. Menyelenggarakan kegiatan pembekalan dan peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan (PWK).
9. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pusat pendidikan wawasan kebangsaan (PPWK) di Provinsi Sumatera Selatan.
10. Fasilitasi Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Sumatera Selatan.
11. Menyelenggarakan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai - nilai Pancasila dikalangan masyarakat.
12. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bahaya radikalisme di Provinsi Sumatera Selatan.
13. Menyelenggarakan kegiatan pendataan dan pengawasan terhadap orang asing dan lembaga asing diwilayah Provinsi Sumatera Selatan.
14. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
15. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pagelaran seni lintas budaya dalam Provinsi Sumatera Selatan.
16. Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

17. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan etika dan budaya Politik kepada masyarakat dan aparatur pemerintah.
18. Menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pemantapan politik dalam negeri.
19. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi silaturahmi daerah pemantapan politik dalam negeri.
20. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi tim verifikasi kelengkapan administrasi dana bantuan keuangan partai politik.
21. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat/generasi muda tentang politik dan demokrasi.
22. Menyelenggarakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik.
23. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan monitoring terhadap Ormas/LSM diwilayah Provinsi Sumatera Selatan.
24. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi perundang-undangan dan peraturan pemerintah bidang keormasan.
25. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pemeriksaan administrasi tanda lapor Ormas/LSM serta penelitian di lapangan dan verifikasi dana hibah pemerintah.
26. Fasilitasi tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Terwujudnya berdemokrasi di Sumatera Selatan	1. Meningkatkan Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	1. Peningkatan, penguatan terhadap partisipasi masyarakat dan Lembaga Masyarakat mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional	1. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi FKUB 2. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 3. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 4. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi Komunitas Intelijen daerah (Kominda) Provinsi Sumatera Selatan 5. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi tim terpadu penanganan konflik sosial di Provinsi Sumatera Selatan
		2. Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI dengan melakukan pembinaan dan peningkatan wawasan kebangsaan	1. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan Kesadaran Bela Negara dikalangan masyarakat 2. Menyelenggarakan kegiatan pembekalan dan peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan (PWK) 3. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pusat pendidikan wawasan kebangsaan (PPWK) di Provinsi Sumatera Selatan 4. Menyelenggarakan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dikalangan masyarakat

			5. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bahaya radikalisme di Provinsi Sumatera Selatan 6. Menyelenggarakan kegiatan pendataan dan pengawasan terhadap orang asing dan lembaga asing di wilayah Provinsi Sumatera Selatan 7. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan 8. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pagelaran seni lintas budaya dalam Provinsi Sumatera Selatan 9. Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 10. Menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Sumatera Selatan 11. Fasilitasi Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Sumatera Selatan
		3. Membangun komunikasi politik yang sehat dan berkualitas antar elemen masyarakat, partai politik dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan etika dan budaya Politik kepada masyarakat dan aparatur pemerintah 2. Menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pemantapan politik dalam negeri 3. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi silaturahmi daerah pemantapan politik dalam negeri 4. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi tim verifikasi kelengkapan administrasi dana bantuan keuangan partai politik

		4. Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat akan arti pentingnya pemilu dan pemilukada melalui sosialisasi dan pembinaan	1. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat/generasi muda tentang politik dan demokrasi 2. Menyelenggarakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik
		5. Melakukan pembinaan sosialisasi dan fasilitasi terhadap pengurus Ormas, Lsm dan LNL di Provinsi Sumatera Selatan	1. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan monitoring terhadap Ormas/Lsm diwilayah Provinsi Sumatera Selatan 2. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi perundang-undangan dan peraturan pemerintah bidang keormasan 3. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pemeriksaan administrasi pendaftaran Ormas/LSM, serta penelitian lapangan dan verifikasi dana hibah pemerintah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap Badan, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan kedalam Kegiatan dan Sub Kegiatan. Penyusunan program juga mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan inventarisasi nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga yang membantu Gubernur dalam menjalankan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan program-program sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.

Penjabaran lebih rinci dari strategi pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026, tujuan dan sasaran serta dengan mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 terdapat 6 (enam) program, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;

Program dan kegiatan tersebut disajikan dalam tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.2. (T-C. 27)
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri												
Terwujudnya Masyarakat Madani	Maju pelayanan berkualitas	8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	16.333.329	100%	11.998.286	100%	13.072.943	100%	41.404.558		
		8.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	355.507	3 Dokumen	180.000	3 Dokumen	180.000	3 Dokumen	715.507		
		8.01.01.1.01.01	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	256.768	1 Dokumen	150.000	1 Dokumen	150.000	1 Dokumen	556.768	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.01.02	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.01.03	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.01.04	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.01.05	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.01.06	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	65.972	1 Laporan	30.000	1 Laporan	30.000	1 Laporan	125.972	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.01.07	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Laporan	32.766	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	32.766	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	7.765.769	100%	7.562.950	100%	7.656.717	100%	22.985.436		
		8.01.01.1.02.01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/Bulan	44 Orang/Bulan	7.312.189	44 Orang/Bulan	7.403.670	44 Orang/Bulan	7.497.437	44 Orang/Bulan	22.213.296	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.02.02	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	347.000	1 Dokumen	106.200	1 Dokumen	106.200	1 Dokumen	559.400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.02.03	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.02.04	- Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000	1 Dokumen	9.700	1 Dokumen	9.700	1 Dokumen	69.400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.02.05	- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	35.000	1 Laporan	35.000	1 Laporan	35.000	1 Laporan	105.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.02.06	- Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.02.07	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	21.580	1 Laporan	8.380	1 Laporan	8.380	1 Laporan	38.340	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.02.08	- Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi barang milik daerah Perangkat Daerah	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
						2024		2025		2026									
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)						
		8.01.01.1.03.01	- Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		-	Dokumen		-	Dokumen		-	Dokumen		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel	
		8.01.01.1.03.02	- Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		-	Dokumen		-	Dokumen		-	Dokumen		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel	
		8.01.01.1.03.03	- Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan		-	Laporan		-	Laporan		-	Laporan		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel	
		8.01.01.1.03.04	- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		-	Laporan		-	Laporan		-	Laporan		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel	
		8.01.01.1.03.05	- Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		-	Laporan		-	Laporan		-	Laporan		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel	
		8.01.01.1.03.06	- penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		-	Laporan		-	Laporan		-	Laporan		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel	
		8.01.01.1.03.07	- Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		-	Dokumen		-	Dokumen		-	Dokumen		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel	
		8.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	450.879	100%	205.539	100%	205.539	100%	861.957						
		8.01.01.1.05.01	- Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	Unit		-	Unit		-	Unit		-	Unit		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.05.02	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Paket	245.340	Paket		-	Paket		-	Paket	245.340	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel		
		8.01.01.1.05.03	- Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	105.539	1 Dokumen	105.539	1 Dokumen	105.539	1 Dokumen	316.617	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel				
		8.01.01.1.05.04	- Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Dokumen		-	Dokumen		-	Dokumen		-	Dokumen		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.05.05	- Monitoring, Evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Dokumen		-	Dokumen		-	Dokumen		-	Dokumen		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.05.06	- Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Dokumen	Dokumen		-	Dokumen		-	Dokumen		-	Dokumen		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.05.07	- Pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	Laporan		-	Laporan		-	Laporan		-	Laporan		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.05.08	- Pemindahan tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang	Orang		-	Orang		-	Orang		-	Orang		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.05.09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fingsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	8 Orang	100.000	8 Orang	100.000	8 Orang	100.000	8 Orang	300.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel				
		8.01.01.1.05.10	- Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Orang		-	Orang		-	Orang		-	Orang		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.05.11	- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Orang		-	Orang		-	Orang		-	Orang		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.286.840	100%	846.245	100%	1.213.347	100%	3.346.432						
		8.01.01.1.06.01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	60.000	1 Paket	60.000	1 Paket	60.000	1 Paket	180.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel				
		8.01.01.1.06.02	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket		-	Paket		-	Paket		-	Paket		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.06.03	- Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Paket		-	Paket		-	Paket		-	Paket		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.06.04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	260.000	1 Paket	260.000	1 Paket	260.000	1 Paket	780.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel				
		8.01.01.1.06.05	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	1 Paket	300.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel				
		8.01.01.1.06.06	- Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000	1 Dokumen	19.569	1 Dokumen	20.000	1 Dokumen	74.569	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel				
		8.01.01.1.06.07	- Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Paket		-	Paket		-	Paket		-	Paket		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)		
		8.01.01.1.06.08	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.06.09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	700.000	1 Laporan	327.678	1 Laporan	641.507	1 Laporan	1.669.185	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.06.10	- Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.06.11	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	131.840	1 Dokumen	78.998	1 Dokumen	131.840	1 Dokumen	342.678	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	25 Jenis	25 Jenis	1.640.000	25 Jenis	161.500	25 Jenis	161.500	25 Jenis	1.963.000		
		8.01.01.1.07.01	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.07.02	- Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	1.140.000	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.07.03	- Pengadaan alat besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.07.04	- Pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.07.05	- Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Paket	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.07.06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	82 Unit	82 Unit	500.000	82 Unit	161.500	82 Unit	161.500	82 Unit	823.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.07.07	- Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit		Unit		Unit		Unit	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.07.08	- Pengadaan aset tetap tak berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	Unit		Unit		Unit		Unit	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.07.09	- Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit		Unit		Unit		Unit	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.07.10	- Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit		Unit		Unit		Unit	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.07.11	- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit		Unit		Unit		Unit	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	1.973.080	100%	1.973.080	100%	1.980.840	100%	5.927.000		
		8.01.01.1.08.01	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	20.000	1 Laporan	19.569	1 Laporan	20.000	1 Laporan	59.569	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	340.000	1 Laporan	332.671	1 Laporan	340.000	1 Laporan	1.012.671	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.08.03	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Laporan	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.08.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	1.589.520	1 Laporan	1.620.840	1 Laporan	1.620.840	1 Laporan	4.831.200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik Daerah	100%	100%	2.884.813	100%	1.068.972	100%	1.675.000	100%	5.628.785		
		8.01.01.1.09.01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.09.02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit	1.275.000	34 Unit	677.595	34 Unit	1.275.000	34 Unit	3.227.595	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.09.03	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan alat besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.09.04	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.09.05	- Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)		
		8.01.01.1.09.06	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.09.07	- Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.09.08	- Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.09.09	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.209.813	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	1.209.813	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.09.10	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.09.11	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit	400.000	25 Unit	391.377	25 Unit	400.000	25 Unit	1.191.377	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.01.1.09.12	- Pemeliharaan/Rehabilitasi tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	Ha	-	Ha	-	Ha	-	Ha	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
Terwujudnya Masyarakat Madani	Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama (Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama)	8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Mengimplementasi dan Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Pancasila	75%	75%	6.072.618	76,5%	2.969.605	78,5%	3.988.716	78,5%	13.030.939		
		8.01.02.1.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Dokumen	6 Dokumen	6.072618	6 Dokumen	2.969.605	6 Dokumen	3.988.716	6 Dokumen	13.030.939	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.02.1.01.01	- Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.782.395	1 Dokumen	2.132.204	1 Dokumen	2.302.055	1 Dokumen	8.216.654	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.02.1.01.02	- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	461.915	1 Dokumen	107.576	1 Dokumen	277.428	1 Dokumen	846.919	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.02.1.01.03	- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250 Orang	250 Orang	385.000	250 Orang	215.393	250 Orang	385.245	250 Orang	985.638	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.02.1.01.04	- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	100 Orang	250.000	100 Orang	168.627	100 Orang	338.479	100 Orang	757.106	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.02.1.01.05	- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	1 Laporan	850.000	1 Laporan	178.429	1 Laporan	348.281	1 Laporan	1.376.710	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.02.1.01.06	- Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Dokumen	1 Dokumen	343.308	1 Dokumen	167.376	1 Dokumen	337.228	1 Dokumen	847.912	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)		
Terwujudnya Masyarakat Madani	Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama (Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama)	8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik	77%	77%	775.832.604	79%	56.146.090	80%	57.146.090	80%	889.124.784		
		8.01.02.1.01	Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Jumlah Dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	6 Dokumen	6 Dokumen	775.832.604	6 Dokumen	56.146.090	7 Dokumen	57.146.090	7 Dokumen	889.124.784	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.02.1.01.01	- Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	155.000	2 Dokumen	125.370	2 Dokumen	325.370	2 Dokumen	605.740	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.02.1.01.02	- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	773.007.604	1 Dokumen	173.214	1 Dokumen	373.214	1 Dokumen	773.554.032	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.02.1.01.03	- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 Orang	150 Orang	250.000	150 Orang	151.817	150 Orang	351.817	150 Orang	753.634	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.02.1.01.04	- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	550 Orang	550 Orang	920.000	550 Orang	55.550.000	550 Orang	55.750.000	550 Orang	112.220.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.02.1.01.05	- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	145.689	1 Laporan	345.689	1 Laporan	1.991.378	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
Terwujudnya Masyarakat Madani	Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama (Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama)	8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang Berkinerja	100%	100%	1.750.000	100%	485.442	100%	935.442	100%	3.170.884		
		8.01.04.1.01	Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	3 Dokumen	3 Dokumen	1.750.000	3 Dokumen	485.442	3 Dokumen	935.442	3 Dokumen	3.170.884	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)		
		8.01.04.1.01.01	- Penyusunan program kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	100.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.04.1.01.02	- Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000	1 Dokumen	162.892	1 Dokumen	312.892	1 Dokumen	725.784	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.04.1.01.03	- Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang	200 Orang	50.000	Orang	-	Orang	-	Orang	50.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.04.1.01.04	- Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang	200 Orang	1.000.000	200 Orang	160.736	200 Orang	310.736	200 Orang	1.471.472	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.04.1.01.05	- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	350.000	1 Laporan	161.814	1 Laporan	311.814	1 Laporan	823.628	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
Terwujudnya Masyarakat Madani	Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama (Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama)	8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Mitra yang Mendukung Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	3.350.000	100%	1.990.561	100%	2.740.561	100%	8.081.122		
		8.01.05.1.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	3 Dokumen	3 Dokumen	3.350.000	3 Dokumen	1.990.561	3 Dokumen	2.740.561	3 Dokumen	8.081.122	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.05.1.01.01	- Penyusunan Program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000	1 Dokumen	115.048	1 Dokumen	265.048	1 Dokumen	530.096	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.05.1.01.02	- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	160.056	1 Dokumen	310.056	1 Dokumen	670.112	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.05.1.01.03	- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600 Orang	600 Orang	1.500.000	600 Orang	293.985	600 Orang	443.985	200 Orang	2.237.970	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)		
		8.01.05.1.01.04	- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	600 Orang	600 Orang	1.200.000	600 Orang	1.259.658	600 Orang	1.409.658	200 Orang	3.869.316	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.05.1.01.05	- Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	300.000	1 Laporan	161.814	1 Laporan	311.814	1 Laporan	773.628	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
Terwujudnya Masyarakat Madani	Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama (Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama)	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosia	Persentase Penurunan kasus yang berpotensi Konflik Sosial	100%	100%	2.791.241	76,5%	995.509	78,5%	1.795.509	78,5%	5.582.259		
		8.01.06.1.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4 Dokumen	4 Dokumen	2.791.241	4 Dokumen	995.509	4 Dokumen	1.795.509	4 Dokumen	5.582.259	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.06.1.01.01	- Penyusunan Program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	250.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.06.1.01.02	- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	488.064	3 Dokumen	168.156	3 Dokumen	368.156	3 Dokumen	1.024.376	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.06.1.01.03	- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	100 Orang	200.000	Orang	-	Orang	-	Orang	200.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.06.1.01.04	- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	200 Orang	583.269	200 Orang	177.940	200 Orang	377.940	200 Orang	1.139.149	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
		8.01.06.1.01.05	- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	300.000	1 Laporan	130.096	1 Laporan	330.096	1 Laporan	760.192	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026					
						Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)	Target	Rp. (000,-)		
		8.01.06.1.01.06	- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	969.906	1 Dokumen	519.317	1 Dokumen	719.317	1 Dokumen	2.208.540	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Prov. Sumsel
			JUMLAH				806.129.793		74.585.493		79.679.261		960.394.547		
			JUMLAH				806.129.793		74.585.493		79.679.261		960.394.547		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah tercapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan menetapkan indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai acuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.

Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1 seperti terlampir :

Tabel 7.1 (T.C.28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
Pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	9
1.	Persentase Kabupaten/Kota Tanpa Konflik	100%	100%	100%	100%	100%

NO.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI KINERJA AWALRPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA AKHIR RPD	
				2024		2025		2026			
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)
I	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				806.129.793		74.585.493		79.679.261		960.394.547
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	90%	100%	16.333.329	100%	11.998.286	100%	13.072.943	100%	41.404.558
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemahaman Wawasan Kebangsaan di masyarakat	70%	75%	6.072.618	76,5%	2.969.605	78,5%	3.988.716	80%	13.030.939
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik	70%	77%	775.832.604	79%	56.146.090	80%	57.146.090	80%	889.124.784
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat yang Bermitra dengan Pemerintah	85%	100%	1.750.000	100%	485.442	100%	935.442	100%	3.170.884
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	85%	100%	3.350.000	100%	1.990.561	100%	2.740.561	100%	8.081.122
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Zero Konflik	60%	100%	2.791.241	100%	995.509	100%	1.795.509	100%	5.582.259

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 ini merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berperan aktif dalam penguatan dan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Sumatera Selatan.

Sasaran Rencana Strategis ini fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak.

Target dan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) ini meliputi sasaran Pemerintah Sumatera Selatan dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, setiap unit kerja harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing-masing menjadi Rencana Kinerja (Renja) tahunan.

Sasaran Rencana Strategis (Renstra) ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam pelaksanaan sehari-harinya, Kepala Badan dibantu oleh seluruh bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Dokumen ini masih memungkinkan diadakannya perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan kekurangan-kekurangan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Sumatera Selatan.

Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan sehingga dalam pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas. Terima kasih.

Palembang, Februari 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Selatan,



SUNARTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 196906081990031006